

Judul : Pro kontra dan dampak anggaran MBG dipangkas
Tanggal : Sabtu, 23 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pro Kontra Dan Dampak Anggaran MBG Dipangkas

Menteri Keuangan (Menku) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan pengurangan Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026. Pemangkas ini langsung menjadi perbincangan.

Purbaya mengatakan, pemangkas anggaran MBG sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Rp 268 triliun, sementara angkanya itu dulu, tetapi ada potensi perbaikan lebih lanjut yang masih dihitung," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian

Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).

Menurut dia, pengurangan dilakukan agar penggunaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program MBG menjadi lebih efektif dan efisien.

Purbaya menegaskan, penghematan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG.

"Jadi jangan menyalahkan MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," ucap Purbaya. Dia menambahkan, Prabowo tetap terbuka terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan program

MBG. Pemerintah sedang menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas program pemberian MBG kepada penerima manfaat.

Per 30 April 2026, anggaran MBG telah terpakai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari Rp335 triliun. Saat ini, sudah ada 61,96 juta penerima dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. "MBG sudah mencapai Rp75 triliun," punjak Purbaya.

Apakah langkah ini efektif di tengah kondisi global yang tidak menentu? Lalu bagaimana dengan kualitas MBG, jika anggarannya dipangkas?

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati berpendapat, pemangkas anggaran MBG tidak otomatis akan berdampak buruk terhadap layanan yang diberikan kepada penerimanya.

Justru, kata dia, pemangkas anggaran bisa menjadi momentum evaluasi dan perbaikan program MBG.

"Bahkan bisa menjadi langkah positif, jika didasarkan pada perhitungan kebutuhan riil, peningkatan efisiensi, dan penguatan tata kelola," ujar Anis kepada Rakyat Merdeka melalui pesan WhatsApp, Jumat (22/5/2026).

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda

berpendangan, memang harus ada evaluasi terhadap program MBG. Menurut dia, evaluasi MBG harus dilihat dari sisi anggaran maupun tata kelola.

"Kalau sekarang pemangkas bisa menghemat sekitar Rp60 triliun sampai Rp70 triliun, mungkin jika yang dievaluasi penerimanya, yakni hanya yang berhak, maka penghematannya bisa sampai ratusan triliun," ungkap Nailul kepada Rakyat Merdeka melalui sambungan telepon, Kamis (21/5/2026).

Untuk mengetahui pandangan Anis Byarwati dan Nailul Huda terkait rencana pemangkas anggaran MBG, berikut wawancara.

ANIS BYARWATI, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS

Penyesuaian Anggaran Pilihan Positif & Rasional



“ Dengan adanya pengurangan anggaran, diharapkan tidak menyebabkan berkurangnya cakupan penerima atau menurunnya kualitas layanan. Mengingat tujuan strategis program MBG adalah pembangunan sumber daya manusia.

Bagaimana Anda melihat rencana Pemerintah memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun? Pemangkas anggaran MBG tidak otomatis merupakan kebijakan yang buruk. Bahkan, bisa menjadi langkah positif.

Apa alasan Anda menilai pemangkas ini justru bisa menjadi langkah positif? Ya, pemangkas ini juga didasari pada perhitungan kebutuhan riil, peningkatan efisiensi, dan penguatan tata kelola.

Menurut Anda, mengapa Pemerintah akhirnya melakukan pemangkas pada salah satu program utamanya yakni MBG? Jika pemerintahan negara menghadapi lekaman, sementara defisit APBN harus di jaga, maka penye-

suain anggaran merupakan pilihan yang rasional. Defisit APBN Indonesia memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pascareformasi, dengan mengesampingkan masa pandemi Covid-19.

Lalu, bagaimana dengan kualitas MBG jika anggarannya mengalami pemangkas? Tentu, dengan adanya pengurangan anggaran, diharapkan tidak menyebabkan berkurangnya cakupan penerima atau menurunnya kualitas gizi. Mengingat tujuan strategis program MBG adalah pembangunan sumber daya manusia.

Artinya, meskipun anggaran dipangkas, kualitas makanan harus tetap terjaga ya? Ya. Karena fokus utama bukan

sekadar "anggaran dipotong atau tidak", melainkan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan perbaikan gizi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara terukur.

Apakah kebijakan pemangkas ini sudah tepat dalam rangka menjaga APBN? Opsi kebijakan apa pun yang diambil oleh Pemerintah harus memiliki dampak paling minimal. Merupakan administered price atau harga yang diatur Pemerintah, seperti BBM, LPG atau listrik, akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih. Sehingga, pilihan memangkas atau melakukan penyesuaian program diyakini lebih rasional, seperti memangkas anggaran program MBG dan memunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears. ■ NNM

NAILUL HUDA, Direktur Ekonomi Digital Celios

MBG Harus Dievaluasi Dan Diubah Sistemnya



“ Kalau dikelola dengan baik, negara bisa mendapat manfaat besar dari sisi hilirisasi dan penerimaan negara. Namun, kalau salah eksekusi, justru bisa mematikan investasi dan membuat buyar global beralih ke negara lain.

Apa tanggapan Anda terhadap langkah Pemerintah memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun? Begini, memang kami sudah menyampaikan berkali-kali bahwa dari sisi MBG ini perlu dievaluasi, baik dari sisi maknanya maupun dari sisi anggarannya, dalam hal penggunaan maupun efektivitasnya. Sebenarnya, dengan langkah Pemerintah memangkas anggaran MBG, bisa dilihat bahwa anggarannya masih bisa diselaraskan. Namun, juga harus dilihat dari sisi evaluasinya.

Evaluasi mengapa? Kami melihat, seharusnya MBG ini dievaluasi dan diubah sistemnya. Seharusnya yang dievaluasi adalah penerimanya, bukan apa yang diterima masyarakat. Kami berharap hanya orang yang berhak saja yang mendapat MBG. Kalau MBG diberikan kepada orang yang tepat, maka anggaran

MBG yang hemat jauh lebih besar.

Siapa yang menurut Anda lebih tepat menerima MBG ini? Siswa yang berasal dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut saya, kalau sekarang penghematan sekitar Rp 60 triliun sampai Rp 70 triliun, mungkin jika yang dievaluasi penerimanya hanya siswa yang berhak, maka penghematannya bisa sampai ratusan triliun.

Terlepas dari itu, kami mengapresiasi pemangkas anggaran MBG. Namun yang jelas, kami berharap MBG dievaluasi secara total, baik dari tata kelola, sistem, maupun penganggarannya. Selanjutnya, ini menjadi langkah awal yang dilakukan Pemerintah.

Bagaimana dengan kualitas MBG jika anggarannya dipangkas? Tentu ada pemangkas anggaran yang, pengelolannya sudah tidak tepat.

Narasi Pemerintah untuk menaikkan gizi, tetapi pelaksanaannya justru fokus pada jumlah penerima. Untuk itu, kami mengusulkan agar penerimanya adalah pihak yang benar-benar berhak.

Dengan sistem target penerima MBG hanya untuk yang berhak, maka MBG yang diberikan akan lebih baik. Dari yang sebelumnya hanya Rp 8.000 sampai Rp 10.000, bisa naik menjadi Rp 15.000 sampai Rp 20.000 untuk sekali makan. Itu usulan yang kami tawarkan. MBG ini lebih baik fokus pada kualitas daripada kuantitas.

Lantas, sektor mana yang harus mendapatkan alokasi anggaran tambahan setelah adanya pemangkas anggaran MBG? Pertama, harus dipastikan dahulu apakah ada anggarannya atau tidak. Sebab akan pecuma, jika dialokasikan, tetapi tidak ada dananya. ■ NNM